

B. Pelaksanaan Bisnis

Perusahaan tambang, seperti bisnis global lainnya, bertanggung jawab kepada para pemilik dan pemegang saham mereka, baik dari perorangan, korporasi, pemerintah, maupun pembayar pajak. Perusahaan tambang juga semakin dituntut pertanggungjawabannya oleh para pemangku kepentingan dan pasar global, yang mengharapkan agar perusahaan menerapkan praktik berbisnis yang etis dan sistem tata kelola serta transparansi operasional perusahaan yang matang. Untuk menjawab tuntutan ini, beberapa perusahaan tambang telah berkomitmen untuk mengelola aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola (EESG) operasinya secara lebih bertanggung jawab.

Sebagaimana upaya-upaya pembangunan ekonomi perusahaan tambang bisa berkontribusi pada tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB (Lihat Bagian A), pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab oleh perusahaan tambang juga dapat membantu negara produsen memperoleh kemajuan dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Misalnya, transparansi praktik bisnis pertambangan, terutama di negara-negara dengan tata kelola yang lemah atau rentan korupsi, tidak hanya membantu menyoroti praktik bisnis perusahaan yang baik, tetapi juga dapat berkontribusi pada akuntabilitas negara produsen yang lebih besar (SDG 16) dan potensi yang lebih besar dalam pemanfaatan kekayaan mineral untuk menurunkan angka kemiskinan (SDG 1) dan membawa manfaat bagi penduduk secara keseluruhan.

Pelaksanaan bisnis dengan menjunjung tinggi integritas juga mendorong perusahaan untuk menghargai hak asasi manusia, pekerja, dan lingkungan; melindungi diri dari korupsi; dan menciptakan nilai bagi negara produsen dan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan. Semua elemen tersebut merupakan konsep penting dalam SDG

B.01 Etika Bisnis, Antisuap, dan Antikorupsi

Etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai etis ke dalam pelaksanaan kiprah perusahaan atau individu di dalam perusahaan tersebut. Daftar nilai etis yang diadopsi oleh sebuah perusahaan memang mengikuti kebijaksanaannya, tetapi sering meliputi nilai-nilai seperti: integritas, keadilan, kejujuran, dapat dipercaya, kebebasan, penghormatan, dan keterbukaan. Nilai-nilai tersebut lantas dapat diterapkan dalam permasalahan ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola (EESG) yang relevan seperti konflik kepentingan; hadiah dan jamuan; donasi dan lobi politik; suap dan korupsi; privasi data; penggunaan media sosial; keragaman; hak asasi manusia; dan perlakuan atau interaksi dengan pekerja, masyarakat, dan lingkungan.

Perilaku etis berpeluang besar terwujud jika nilai-nilai ditanamkan ke dalam budaya perusahaan, di seluruh departemen dan operasinya; perilaku yang diharapkan dikomunikasikan secara jelas ke semua karyawan (melalui program penyuluhan/sosialisasi dan peningkatan kesadaran), mitra bisnis dan pemangku kepentingan yang relevan; ada sanksi atas pelanggaran perilaku tidak etis, tetapi juga insentif untuk mewujudkan perilaku etis yang tinggi; dan ada mekanisme pemantauan untuk memahami tingkat kepatuhan perusahaan pada nilai-nilai yang dipedomaninya. Yang juga penting adalah pelaporan ke karyawan dan pemangku kepentingan, yang mendorong pembelajaran dan akuntabilitas di semua tingkat di perusahaan, dan memberikan sarana untuk menunjukkan bahwa komitmen yang diambil di tingkat korporasi benar-benar dijalankan di tingkat operasional pertambangan.

Perusahaan yang berkomitmen pada perilaku etis juga akan menerapkan mekanisme yang efektif yang memudahkan individu di dalam dan di luar perusahaan untuk mengadukan keprihatinan terhadap perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum, termasuk hotline pelaporan pelanggaran atau prosedur serupa yang memudahkan pelaporan secara anonim dan rahasia tanpa takut diancam balik atau dibalas. Dalam situasi tertentu, demi membangun kepercayaan terhadap mekanisme tersebut, pihak ketiga independen mungkin diperlukan untuk mengelola mekanisme dan melaporkan balik hasilnya ke perusahaan. Penciptaan budaya saling percaya dan keterbukaan juga berarti memastikan pekerja (karyawan dan pekerja kontrak) dan pemasok memiliki kepercayaan diri, dan didorong, untuk mengadukan masalah yang menjadi keprihatinan, dan bahwa perlindungan diberikan bagi orang-orang yang menyampaikan keluhan. Langkah ini, pada gilirannya, lebih berpeluang memberikan identifikasi dan pencegahan awal terhadap perilaku yang tidak bisa diterima, sehingga memudahkan perusahaan untuk melindungi reputasinya, mengurangi kerugian keuangan, meningkatkan semangat kerja karyawan dan menurunkan angka keluar-masuk pegawai.

Bagian tidak terpisahkan dari pendekatan perilaku etis perusahaan adalah sistem yang kuat untuk mencegah bentuk suap dan korupsi baik langsung maupun tidak

langsung. Pada 2003, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi. Dalam dokumen konvensi tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyatakan bahwa, “Korupsi sangat menyakiti negara miskin dengan mengalihkan dana yang diperuntukkan bagi pembangunan, sehingga melemahkan kemampuan suatu Pemerintah untuk memberikan layanan dasar, memperbesar ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta memutus bantuan dan investasi asing. Korupsi adalah unsur penting penyebab melemahnya kinerja ekonomi sekaligus hambatan besar bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan.”

Komitmen	<p>Perusahaan berkomitmen untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi baik langsung maupun tidak langsung? b. Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini? c. Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini?
-----------------	---

Efektivitas	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya terkait antisuap dan antikorupsi.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang pencegahan suap dan korupsi, termasuk jumlah dan sifat/bentuk insiden dan tindakan yang diambil sebagai responsnya? b. Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mencegah semua bentuk suap dan korupsi baik langsung maupun tidak langsung? c. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mencegah segala bentuk suap dan korupsi baik langsung maupun tidak langsung?
--------------------	---

Efektivitas	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk menyempurnakan efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran untuk melaporkan keprihatinan terhadap perilaku yang tidak etis.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. a. Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan sepanjang kurun waktu yang berurutan, tentang fungsi dan pemanfaatan mekanisme perusahaan terkait pelaporan pelanggaran, termasuk jumlah dan karakteristik insiden serta tindakan yang diambil sebagai respons? b. Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran? c. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran?
--------------------	---

B.02 Pertanggungjawaban dan Keragaman Direksi dan Manajemen Senior

Kelangsungan perusahaan adalah konsep yang sudah diterima oleh perusahaan di seluruh dunia. Konsep ini semakin dipandang penting bagi kesuksesan perusahaan jangka panjang. Konsep ini mencakup bahwa perusahaan menghargai tanggung jawab fundamental di bidang seperti hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan antikorupsi, dan mengambil tindakan untuk mendukung dan menciptakan nilai bagi masyarakat di sekelilingnya.

Perusahaan semakin gencar mengembangkan kebijakan yang memperlihatkan komitmen pada perilaku yang bertanggung jawab atas permasalahan ekonomi, lingkungan, sosial (termasuk hak asasi manusia), dan tata kelola (EESG). Namun kebijakan tidak selalu mengejawantah menjadi perubahan positif jangka panjang di negara-negara produsen atau pergeseran berkelanjutan pada budaya dan nilai-nilai perusahaan menuju perilaku yang lebih bertanggung jawab. Keberhasilan implementasi kebijakan biasanya membutuhkan komitmen, kepemimpinan, dan akuntabilitas dari jajaran direksi perusahaan dan manajer senior (di tingkat perusahaan dan lokasi tambang), serta pegawai yang penuh dedikasi di tingkat operasional untuk memastikan penerapan keputusan strategis di seluruh operasi perusahaan.

Pencapaian tujuan perusahaan untuk melindungi nilai-nilai lingkungan, hak asasi manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosio-ekonomi masyarakat dapat diwujudkan dengan lebih baik ketika menerapkan mekanisme akuntabilitas internal dan insentif untuk kinerja, yang dapat diterapkan pada pengambil kebijakan di tingkat perusahaan dan pada para manajer serta pekerja di tingkat lokasi tambang. Tindakan semacam itu dapat membantu meningkatkan kinerja dan sikap di tingkat operasional terhadap relevansi komitmen EESG, serta membantu menanamkannya ke dalam budaya dan nilai-nilai perusahaan.

Komposisi direksi perusahaan dan manajemen senior juga dapat memengaruhi keberhasilan implementasi tujuan EESG. Anggota direksi dan manajer dengan gender, etnis, dan usia yang berbeda, serta beraneka ragam latar belakang dan kualifikasi, termasuk permasalahan ekonomi, lingkungan, dan sosial, dapat berkontribusi pada spektrum pengetahuan yang luas tentang kemungkinan pola pengaruh faktor eksternal terhadap perusahaan.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa keragaman gender di jajaran direksi dan jabatan manajemen senior dapat menghasilkan kinerja keuangan yang secara keseluruhan lebih baik, tata kelola perusahaan yang bagus, kepatuhan pada standar EESG global yang lebih besar, kinerja yang lebih baik dalam hal keberlanjutan, inovasi yang lebih besar, manajemen risiko yang lebih baik, dan reputasi perusahaan yang lebih bagus.

Tindakan	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk meminta pertanggungjawaban direksi dan manajer senior secara perseorangan atas pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab terkait masalah-masalah ESG.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan:</i></p> <ol style="list-style-type: none">Penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing anggota dewan direksi dan manajer senior atas pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab terkait permasalahan ESG?Berlakunya persyaratan kompetensi bagi masing-masing anggota manajemen senior utama dan jabatan direksi yang bertanggung jawab atas permasalahan ESG?Pertanggungjawaban masing-masing anggota direksi dan manajer senior atas kelancaran hal-hal tersebut di atas melalui langkah-langkah yang terdokumentasi?
-----------------	--

Efektivitas	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan keberimbangan gendernya di tingkat direksi dan manajemen senior.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none">Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang persentase perempuan di tingkat direksi dan manajemen senior?Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas intervensinya (program, prakarsa, dll.) untuk meningkatkan keberimbangan gender di tingkat manajemen senior?Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan keberimbangan gender di tingkat manajemen senior?
--------------------	---

B.03 Pengungkapan Kontrak

Negara-negara produsen menerbitkan lisensi dan mengadakan perjanjian dengan perusahaan untuk melakukan eksplorasi atau eksploitasi sumber daya mineral (misalnya, melalui lelang, sewa, surat izin, perjanjian konsesi, perjanjian eksplorasi dan eksploitasi, perjanjian pengembangan). Pemerintah juga menandatangani kontrak atau merundingkan perjanjian dengan perusahaan untuk menyusun beragam syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan pengembangan mineral, seperti keuntungan keuangan yang akan diterima oleh negara dari pajak, bagi hasil, bagi keuntungan, dan royalti; ketentuan yang berkaitan dengan infrastruktur penting atau investasi lain; dan syarat yang dapat menimbulkan implikasi bagi warga masyarakat, seperti langkah-langkah perlindungan lingkungan atau hak terkait pemanfaatan lahan atau masyarakat lokal yang terpaksa pindah.

Pemerintah memikul tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam negaranya dengan cara-cara yang sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, korupsi, kurangnya informasi, atau tantangan kapasitas kelembagaan telah menghambat beberapa negara sehingga tidak dapat merundingkan kesepakatan terbaik bagi warganya – sering berakibat pada hilangnya potensi pendapatan senilai jutaan atau miliaran dolar.

Kontrak yang mengatur pertambangan atau proyek ekstraktif yang lain bisa jadi merupakan peraturan paling signifikan yang mengatur keuntungan yang diterima oleh negara-negara produsen dan masyarakat terdampak, tetapi sayangnya, dokumen kepentingan publik ini sering disembunyikan dari pengetahuan publik. Menurut sebuah laporan pada 2015 oleh Extractive Industries Transparency Initiative (Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif), meskipun beberapa negara memublikasikan kontrak, transparansi bukan sesuatu yang bersifat universal. Dalam beberapa kasus, ada larangan hukum atau kontraktual terkait pengungkapan (membuka isi kontrak), dan dalam kasus lain, meskipun undang-undang mendukung dilakukannya pengungkapan, hanya sebagian saja atau bahkan tidak terjadi pengungkapan/keterbukaan.

Akan tetapi semakin disadari bahwa pengungkapan/keterbukaan kontrak diperlukan untuk mendorong manajemen yang bertanggung jawab dan tata kelola sumber daya alam yang baik, serta memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan memastikan iklim persaingan usaha yang sehat bagi perusahaan. Dengan secara sistematis menjadikan kontrak tersedia secara publik, para pejabat pemerintah memiliki lebih banyak perangkat dan insentif yang lebih besar untuk merundingkan kontrak yang menjamin diterimanya jatah keuntungan yang adil oleh negara mereka dari pengembangan mineral. Transparansi kontrak memungkinkan masyarakat sipil untuk memainkan peran yang lebih besar dalam perdebatan seputar cara negara berkembang mengelola sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan juga dapat membantu perusahaan serta pemerintah untuk memperlihatkan kepada rakyatnya nilai proyek pertambangan dan ekspektasi penghasilan realistis dari suatu

kurun waktu. Selain mengungkapkan kontrak, pengungkapan dokumen terkait (termasuk, misalnya, catatan alokasi dan proses pemberian izin serta informasi tentang syarat kontrak berikut implementasinya) dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi yang lebih kuat.

Semakin banyak perusahaan dan asosiasi tambang yang mendukung praktik publikasi kontrak, dengan menyatakan bahwa publikasi tersebut menjamin iklim persaingan usaha yang sehat bagi perusahaan dan membantu meningkatkan kualitas hubungan mereka dengan masyarakat secara umum dan memenuhi ekspektasi warga secara lebih efektif. Beberapa perusahaan juga mengambil peran kepemimpinan dalam memajukan transparansi dengan mengungkapkan kontrak di negara-negara yang tidak mewajibkannya, sedangkan perusahaan yang lain secara proaktif mencantumkan klausul pengecualian dalam kontrak dengan pemerintah yang memungkinkan pengungkapan public

Tindakan

Perusahaan secara publik mengungkapkan seluruh dokumen hukum yang memberinya hak untuk melakukan ekstraksi sumber daya mineral di lokasi tambang.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Secara publik mengungkapkan semua dokumen hukumnya (misalnya, kontrak, surat izin, lisensi, sewa, konvensi, perjanjian) yang memberinya hak untuk melakukan ekstraksi sumber daya mineral di lokasi tambang?
- b. Membuat dokumen tersebut tersedia bebas di situs web perusahaan?
- c. Secara publik mengungkapkan semua dokumen ini sebagai dokumen dengan teks lengkap tanpa redaksi ulang atau pengurangan?

B.04 Transparansi Pajak

Pajak terkait pertambangan merupakan sumber pendapatan yang besar sangat penting bagi negara-negara kaya mineral. Pendapatan dari pajak memungkinkan negara melakukan belanja untuk layanan publik dan infrastruktur vital. Dalam hal negara-negara berkembang, basis pajak yang kuat dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan asing sehingga memungkinkan negara lebih mandiri dalam mengatur pembangunannya sendiri. Jika dikelola secara cermat, pajak yang diterima sepanjang siklus operasional pertambangan dapat membiayai prakarsa pembangunan ekonomi dan sosial yang akan terus memberikan manfaat jangka panjang setelah operasi tambang berhenti.

Banyak dijumpai bukti bahwa kebanyakan negara produsen tidak berhasil memungut persentase pajak yang besar dari industri ekstraktif, terutama dari perusahaan dengan operasi di banyak negara. Perusahaan mampu menghindari pembayaran pajak melalui taktik yang patut dipertanyakan tetapi sah secara hukum, seperti manipulasi harga transfer (dengan mengalihkan laba ke anak perusahaan di yurisdiksi rendah-pajak atau rahasia), pengecoh harga perdagangan (dengan menyatakan nilai produk yang diekspor di bawah harga yang sesungguhnya), atau melalui penggunaan struktur kepemilikan yang kompleks. Penggelapan pajak juga dapat terjadi melalui aktivitas ilegal, seperti penyelundupan.

Negara-negara berkembang juga bisa kecolongan pendapatan pajak dengan memberikan insentif seperti pembebasan PPh Badan dalam waktu tertentu (tax holiday) atau pengurangan tarif pajak. Sering terjadi, insentif pajak di negara-negara produsen tidak disusun berdasarkan analisis biaya-manfaat yang tepat, tetapi justru didorong oleh tekanan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dibandingkan dengan negara tetangga. Selain itu, mengingat ciri operasi tambang yang memiliki lokasi spesifik, ada banyak sekali contoh yang menunjukkan bahwa investasi tetap akan terjadi tanpa insentif pajak. Meskipun tidak melanggar hukum, insentif pajak yang terlalu murah hati atau diberikan dengan maksud yang tidak baik bisa dipandang dengan kecurigaan, menciptakan masalah legitimasi bagi pemerintah dan perusahaan, dan tidak ada kontribusinya bagi peningkatan iklim investasi di sebuah negara.

Banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk membangun kebijakan, struktur, dan kapasitas pemberlakuan pajak dengan cara yang menarik investasi dan memberikan keuntungan ekonomi bagi negara. Tidak ada definisi tunggal transparansi pajak, tetapi biasanya meliputi pengungkapan informasi tentang besaran keuntungan yang diraup oleh sebuah perusahaan di setiap negara tempatnya beroperasi dan besaran pajak yang dibayar di setiap negara (Lihat B.06), dan pelaporan tentang strategi pajak, seperti pendekatan perpajakan, detail tentang manajemen risiko pajak dan perencanaan pajak, dan informasi tentang suaka pajak.

Perusahaan global semakin menyadari bahwa komitmen kebijakan terkait pajak dan pengungkapan strategi dan praktik pajak secara proaktif di tingkat negara sangatlah

penting dalam membangun dan memelihara hubungan serta kredibilitas dengan para investor dan negara-negara produsen, berikut peningkatan iklim investasi yang stabil di negara-negara tempat mereka beroperasi.

Tindakan	<p>Perusahaan mempraktikkan transparansi pajak di semua yurisdiksi pajaknya.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri secara publik:</i></p> <ol style="list-style-type: none">a. Mengungkapkan struktur perusahaan yang mencantumkan semua yurisdiksi pajak yang menjadi wilayah pendaftaran bagi badan hukum perusahaan dan nama (misalnya, nama anak perusahaan atau cabang perusahaan) yang digunakan di tempat tersebut?b. Laporan tentang pendekatannya terhadap transparansi pajak, termasuk strategi yang berkaitan dengan eksistensinya di yurisdiksi rendah-pajak?c. Mengungkapkan semua insentif pajak dan pengurangan pajak yang diterima di tingkat lokal dan nasional di semua yurisdiksi pajak tempatnya mendaftarkan badan hukum perusahaan?
-----------------	--

B.05 Kepemilikan Manfaat yang Sebenarnya

Identitas orang-orang yang sesungguhnya memiliki, mengontrol, dan memetik keuntungan dari aktivitas perusahaan tambang - para pemilik manfaat yang sebenarnya - tidak selalu diungkapkan. Dalam beberapa kasus, mereka tersembunyi di balik rantai perusahaan atau entitas swasta di berbagai negara.

Ketika kepemilikan sebuah perusahaan tidak jelas, muncullah lahan subur bagi korupsi, penggelapan pajak, pencucian uang, dan jenis-jenis lain malapraktik keuangan, yang lantas dapat menimbulkan dampak ekonomi, lingkungan, atau sosial yang negatif. Misalnya, seseorang dengan saham kepemilikan di sebuah perusahaan bisa jadi memegang posisi untuk memengaruhi pemberian kontrak pemerintah, lisensi pertambangan, atau surat izin ke perusahaan yang tidak memenuhi syarat, atau menyetujui syarat dan ketentuan yang terlalu longgar. Identitas para pemilik manfaat yang sebenarnya itu penting diketahui demi menangkal korupsi dan menjamin agar perusahaan yang sudah mendapatkan lisensi memiliki niat dan kepakaran keuangan dan teknis yang diperlukan untuk mengembangkan, beroperasi, dan menutup proyek pertambangan secara bertanggung jawab.

Pemerintah, lembaga keuangan, prakarsa sukarela, dan bahkan para eksekutif perusahaan tambang semakin mendukung dan bergerak ke arah transparansi yang lebih baik dalam hal kepemilikan manfaat perusahaan yang sebenarnya. Misalnya, EITI (Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif) telah menerapkan persyaratan bahwa pada 2020 “semua negara yang melaksanakan EITI harus memastikan semua perusahaan minyak, gas, dan pertambangan yang mengajukan penawaran, beroperasi, atau berinvestasi dalam proyek-proyek ekstraktif di negara mereka mengungkapkan para pemilik yang sebenarnya,” dan membeberkan tingkat

kepemilikan serta detail tentang pola kepemilikan atau pengendaliannya (misalnya, melalui persentase kepemilikan saham di perusahaan, atau kontrol melalui kesepakatan kontrak atau surat kuasa).

Pengungkapan kepemilikan manfaat yang sebenarnya secara proaktif dengan cepat menjadi praktik standar di dalam industri ekstraktif. Pengungkapan tersebut menunjukkan komitmen pada transparansi dan integritas pemberian lisensi mineral dan proses kontrak. Pengungkapan juga akan membantu membangun rasa percaya yang lebih besar dari pemangku kepentingan pertambangan, membantu menghindari risiko korupsi dan penggelapan pajak, dan memudahkan pemerintah untuk menilai kredibilitas proposal pertambangan dengan lebih baik sehingga meningkatkan iklim investasi bagi sektor pertambangan secara global

Tindakan	<p>Perusahaan mengungkapkan para pemilik manfaat yang sebenarnya.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri secara publik:</i></p> <ol style="list-style-type: none">a. Mengungkapkan nama-nama pemilik manfaat yang sebenarnya (yaitu, tidak hanya pemegang saham langsung), dengan memerinci tingkat kepemilikan ambang batas yang berlaku pada pengungkapan ini?b. Mengungkapkan pola kepemilikan dan pelaksanaan kontrol?c. Mengidentifikasi para penerima manfaat yang merupakan orang-orang dengan ekspos politik dan mengungkapkan pemutakhiran informasi secara rutin?
-----------------	---

B.06 Pembayaran ke Negara-Negara Produsen

Pemerintah memberikan hak kepada perusahaan tambang untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, dan, sebagai imbalannya, perusahaan membayar pajak, royalti, biaya lisensi, bonus, atau memberikan kontribusi lain sebagai kompensasi atas kekayaan mineral yang diekstrak. Pembayaran oleh perusahaan tambang dapat menjadi sumber pendapatan yang besar bagi negara-negara berkembang, dan berpotensi meledak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

Informasi tentang pembayaran ke pemerintah sering tidak tersedia secara publik. Transparansi yang lebih besar dari perusahaan tambang akan membantu pemerintah dan masyarakat mengetahui apakah perusahaan memenuhi kewajiban kontraknya (Lihat B.03), dan memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan kontribusi ekonominya kepada pekerja, masyarakat lokal, dan perekonomian nasional secara umum.

Umum disepakati bahwa transparansi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif kepada pemerintah dapat meningkatkan tata kelola yang baik dengan meniadakan kondisi-kondisi yang memicu korupsi dan penyalahgunaan pendapatan. Pengelolaan pendapatan mineral yang lebih baik, pada gilirannya, meningkatkan

potensi untuk mengurangi angka kemiskinan dan mendorong perekonomian yang berkelanjutan. Pengungkapan pembayaran juga menjadi cara negara untuk mengurangi risiko politik dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, berbagai upaya peningkatan transparansi pembayaran telah mendapatkan perhatian. Secara khusus, EITI (Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif), sebuah standar global yang mendorong manajemen sumber daya minyak, gas, dan mineral secara terbuka dan bertanggung jawab, dan berbagai regulasi di Uni Eropa dan Kanada, telah menetapkan kewajiban hukum bagi banyak perusahaan tambang untuk melaporkan pembayaran yang dilakukan kepada badan-badan pemerintah subnasional dan nasional, dan untuk mengungkapkan pembayaran tersebut untuk setiap negara tempatnya beroperasi.

Pengungkapan tingkat proyek juga menjadi praktik standar di banyak negara maju, dan ada imbauan untuk melakukan pelaporan serupa yang berbasis proyek di wilayah lain. Masyarakat yang tinggal di dekat area pertambangan merasakan bermacam-macam dampak sosial dan lingkungan, tetapi mereka sering tidak mendapatkan dana yang memadai untuk mengurangi dampak dan mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun mereka secara hukum berhak menerima persentase pendapatan yang dihasilkan oleh proyek-proyek pertambangan.

Akses ke data pendapatan baik di tingkat negara maupun tingkat proyek memudahkan pemerintah lokal untuk memantau kepatuhan perusahaan pada kewajiban kontrak, dan memungkinkan masyarakat lokal untuk melacak hak hukum mereka dan meminta pertanggungjawaban pemerintah jika pendapatan tidak dialokasikan sebagaimana mestinya.

Di negara-negara yang belum menerapkan persyaratan di tingkat proyek, perusahaan yang menyatakan kesediaan untuk mengungkapkan pembayaran dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan serta memungkinkan masyarakat di negara-negara produsen untuk menjadi lebih tahu tentang pendapatan yang diterima dari pertambangan dan pola pembelanjaan atas pendapatan tersebut.

Tindakan

Perusahaan secara publik mengungkapkan semua pembayaran yang dilakukannya ke pemerintah subnasional dan nasional, dengan memberikan data terpilah di tingkat proyek.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Secara publik mengungkapkan informasi yang terpilah di tingkat proyek tentang semua pembayaran yang dilakukan ke pemerintah subnasional dan nasional?
- b. Membuat informasi ini tersedia bebas di situs web utama perusahaan?
- c. Memutakhirkan informasi ini setiap tahun?

B.07 Praktik-Praktik Lobi

Di banyak negara, lobi memainkan peran menonjol dalam pengambilan kebijakan. Para pelobi swasta, kelompok industri, dan organisasi masyarakat sipil menempuh beragam cara untuk memengaruhi politisi dan pembuat keputusan. Namun kegiatan lobi sering tidak diatur dalam regulasi sehingga kepentingan adikuasa berpeluang mengerahkan pengaruh yang tidak semestinya melalui praktik-praktik yang korup atau mencurigakan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas lobi secara umum menimbulkan kecurigaan bahwa perusahaan, baik secara mandiri maupun melalui badan-badan industri, mendukung peraturan yang tidak mendukung kepentingan terbaik masyarakat.

Perusahaan tambang bisa mengambil langkah-langkah proaktif untuk membantu mendorong integritas dan kepercayaan yang lebih besar pada proses pengambilan keputusan publik serta menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar dari para pemangku kepentingan. Misalnya, secara sukarela mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan praktik lobi, serta kontribusi/ sumbangan politik mereka. Mereka juga dapat mengungkapkan posisi lobi, yang tidak hanya menunjukkan kesediaan bersikap transparan, tetapi juga membeberkan bidang-bidang kepentingan bersama dengan pemangku kepentingan, dan memberikan peluang kerja sama untuk mengembangkan kebijakan publik yang dapat melayani masyarakat terdampak, negara-negara produsen, dan juga industri pertambangan.

Meskipun merupakan aktivitas yang sah dan menjadi bagian penting dari proses demokrasi, lobi bukanlah satu-satunya sarana bagi perusahaan tambang untuk memengaruhi kebijakan pertambangan dan reformasi kelembagaan atau ekonomi. Banyak perusahaan tambang terlibat dalam kemitraan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain untuk membantu meningkatkan kapasitas pemerintah di negara produsen untuk mengelola sumber daya mineral dan mengembangkan peluang ekonomi.

Transparansi yang lebih baik dalam lobi dan keterlibatan dalam dialog multipemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi mineral dan tata kelola sumber daya merupakan sarana penting untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan, memberantas suap dan korupsi (Lihat B.01), dan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan menarik.

Tindakan

Jika memungkinkan, perusahaan secara publik mengungkapkan praktik-praktik lobi dan posisinya di semua yurisdiksi.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri secara publik:

- Mengungkapkan peran dan tanggung jawab orang-orang yang terlibat dalam aktivitas lobi di semua yurisdiksi?
- Mengungkapkan materi dari aktivitas lobi berikut hasil yang dicari?
- Mengungkapkan nama-nama pejabat publik atau institusi yang terlibat?

B.08 Penandatanganan Kontrak dan Pemerolehan Sumber Daya yang Bertanggung Jawab

Muncul ekspektasi global yang makin besar bahwa perusahaan tidak hanya menunjukkan tingginya tanggung jawab mereka dalam hal hak asasi manusia, sosial, dan lingkungan hidup, tetapi juga menuntut hal yang sama dari mitra usaha serta rantai pasok mereka.

Perusahaan tambang sering mengadakan kontrak dengan perusahaan lain yang memberikan layanan spesialis, seperti pengelasan reparasi, kerja mekanik, dan pemeliharaan fasilitas. Jasa keamanan juga sering dialihkan ke pihak luar yang dikontrak (Lihat D.02). Dalam sepuluh tahun terakhir, kekurangan tenaga kerja atau upaya pemangkasan biaya juga telah meningkatkan penggunaan pekerja kontrak untuk operasi pertambangan inti.

Penggunaan tenaga kerja kontrak menimbulkan implikasi bagi perusahaan tambang. Perekrutan pekerja melalui kontraktor bisa memunculkan masalah kesehatan dan keselamatan kerja yang harus dikelola. Selain itu, praktik ketenagakerjaan, sosial, atau lingkungan yang buruk oleh kontraktor memunculkan risiko reputasi dan keuangan bagi perusahaan tambang. Misalnya, ketimpangan upah dan kondisi kerja antara pekerja dengan kontraktor menjadi perhatian akibat ketidaksetaraan inheren, dan juga karena ketimpangan tersebut telah menimbulkan protes keras dan penutupan sementara tambang.

Perusahaan tambang juga menghadapi risiko yang berkaitan dengan praktik pemasoknya, seperti gangguan pasokan dan rusaknya reputasi yang timbul karena kecelakaan, permasalahan ketenagakerjaan, korupsi, hubungan dengan kelompok bersenjata atau aktivitas ilegal, pelanggaran HAM, protes masyarakat, atau upaya hukum yang berkaitan dengan ketidakpatuhan pemasok pada peraturan sosial atau lingkungan.

Perusahaan dapat meminimalkan risiko bagi pekerja, masyarakat, lingkungan, dan reputasinya sendiri dengan menilai risiko sosial, lingkungan, ketenagakerjaan, dan HAM yang berkaitan dengan pemasok dan kontraktor, serta memastikan kontraktor, subkontraktor, dan pemasok berkomitmen dan mengimplementasikan standar sosial, lingkungan, dan etika yang tinggi dalam kegiatan mereka serta di sepanjang rantai pasok mereka sendiri.

Pendekatan ini semakin banyak ditempuh oleh perusahaan tambang terkemuka. Misalnya, banyak sekali perusahaan tambang menerapkan kode perilaku yang berlaku sama bagi karyawan, kontraktor, subkontraktor, dan pemasok, meskipun kode perilaku ini sering tidak mengikat. Akibatnya, kini beberapa perusahaan tambang memasukkan persyaratan sosial dan lingkungan ke dalam kontrak bilateral untuk menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum. Beberapa perusahaan juga melakukan audit untuk menilai kepatuhan dan mengevaluasi seberapa baik

kontraktor, subkontraktor, dan pemasok mengelola dampak yang mereka timbulkan dan dampak yang mungkin timbul dalam rantai pasok mereka sendiri.

Selain mencantumkan ekspektasi ke dalam perjanjian, perusahaan tambang menanamkan sumber daya pada pelatihan kontraktor, subkontraktor, dan pemasok untuk membantu mereka memenuhi persyaratan perusahaan. Program ini saling menguntungkan: perusahaan tambang mengurangi risiko ketenagakerjaan dan risiko rantai pasok serta menciptakan hubungan yang lebih stabil dan andal; sementara itu, pemasok, kontraktor, dan subkontraktor dapat mengurangi risiko mereka masing-masing, membangun kapasitas dan berpotensi mendapatkan akses ke keuangan rantai pasok yang lebih kompetitif.

Tindakan

Perusahaan menerapkan sistem untuk mengidentifikasi dan menilai risiko hak asasi manusia, tenaga kerja, dan lingkungan yang berkaitan dengan pemasok dan kontraktornya.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan pemasok dan kontraktor seputar:

- a. Masalah hak asasi manusia?
- b. Masalah tenaga kerja?
- c. Masalah lingkungan?

Scoring Framework

B.01.1 Perusahaan berkomitmen untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung. (/6.00)

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa perusahaan tersebut memiliki:

A. Meresmikan komitmennya, yang didukung oleh manajemen senior, untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung?

- 2 poin** Perusahaan berkomitmen untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam dokumen formal yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan dan disahkan oleh manajemen senior.
- 1 poin** Perusahaan berkomitmen untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam dokumen formal yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan, namun tidak ada bukti bahwa komitmen ini didukung oleh manajemen senior.
ATAU
Perusahaan berkomitmen untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam dokumen formal yang disahkan oleh manajemen senior, namun tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan
ATAU
Perusahaan berkomitmen untuk mencegah suap dan korupsi dalam dokumen formal yang disahkan oleh manajemen senior, namun komitmen tersebut tidak mencakup semua bentuk suap dan korupsi.
- 0.5 poin** Perusahaan mengacu pada perlunya mencegah segala bentuk suap dan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, namun tidak membuat komitmen yang jelas dalam dokumen formal yang disahkan oleh manajemen senior.

B. Menugaskan tanggung jawab dan akuntabilitas tingkat manajemen atau dewan direksi untuk melaksanakan komitmen ini?

- 2 poin** Perusahaan memiliki fungsi tingkat manajemen senior dan/atau Dewan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan komitmen ini dan terdapat informasi rinci mengenai ruang lingkup, peran, dan akuntabilitas sebenarnya.
- 1 poin** Perusahaan memiliki fungsi tingkat manajemen senior dan/atau Dewan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan komitmen ini namun informasi mengenai ruang lingkup, peran, dan akuntabilitas aktualnya terbatas
ATAU
Perusahaan memberikan bukti yang memenuhi syarat untuk mendapat skor 2, namun perusahaan mendapat skor 1 di bawah a).
- 0.5 poin** Perusahaan secara singkat merujuk pada fungsi di tingkat manajemen senior dan/atau tingkat Dewan untuk melaksanakan komitmen ini, namun tidak memberikan informasi tambahan apa pun.
ATAU
Perusahaan memberikan bukti yang memenuhi syarat untuk mendapat skor 2 atau 1, namun perusahaan mendapat skor 0,5 di bawah a).

C. Berkomitmen sumber daya keuangan dan staf untuk melaksanakan komitmen ini?

- 2 poin** Perusahaan memiliki tim tingkat operasional di seluruh perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya pencegahan suap dan korupsi.
ATAU
Perusahaan menyelenggarakan program dan/atau lokakarya penyadaran dan/atau pelatihan di seluruh perusahaan terkait dengan komitmennya untuk mencegah

- penyuapan dan korupsi, dan terdapat bukti rinci mengenai sumber daya keuangan dan/atau kepegawaian spesifik yang dilakukan
- 1 poin** Perusahaan menyelenggarakan program dan/atau lokakarya penyadaran dan/atau pelatihan di seluruh perusahaan terkait penyuapan dan korupsi, namun informasi mengenai sumber daya keuangan dan/atau kepegawaian aktual yang dilakukan terbatas.
ATAU
Perusahaan memiliki tim tingkat operasional di seluruh perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya pencegahan penyuapan dan korupsi, namun hanya pada beberapa aspek penyuapan dan korupsi yang terbatas
ATAU
Perusahaan mengalokasikan sumber daya keuangan dan/atau staf untuk melaksanakan komitmen ini (program kesadaran/pelatihan/lokakarya dan/atau tim yang bertanggung jawab) namun tidak pada skala perusahaan secara keseluruhan.
ATAU
Perusahaan memberikan bukti yang memenuhi syarat untuk mendapat skor 2, namun perusahaan mendapat skor 1 di bawah a).
- 0.5 poin** Perusahaan memiliki persyaratan yang berlaku di seluruh perusahaan mengenai komitmen sumber daya keuangan dan/atau staf, namun hanya ada sedikit bukti bahwa sumber daya tersebut telah dikomitmenkan.
ATAU
Perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk menyelidiki dan menangani tuduhan dan pelanggaran kebijakan terkait, namun tidak ada bukti sumber daya yang berkomitmen untuk mencegah penyuapan dan korupsi
ATAU
Perusahaan memberikan bukti yang memenuhi syarat untuk mendapat skor 2 atau 1, namun perusahaan mendapat skor 0,5 di bawah a).

B.01.2 Perusahaan melacak, meninjau dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam bidang anti-suap dan korupsi. (/6.00)

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan bahwa secara sistematis:

A. Melacak dan mengungkapkan data, dalam periode waktu yang berurutan, mengenai pencegahan suap dan korupsi, termasuk jumlah dan sifat insiden serta tindakan yang diambil sebagai tanggapannya?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan data terkini seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) dalam periode waktu yang berurutan termasuk jumlah, sifat, dan tindakan yang diambil sebagai respons.
ATAU
Perusahaan melaporkan bahwa tidak ada insiden terkait korupsi yang terjadi sama sekali dalam periode penilaian dan datanya dibandingkan selama periode waktu berikutnya
- 1 poin** Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) hanya pada dua dari tiga dimensi: jumlah, sifat, atau tindakan yang diambil sebagai respons.
ATAU
Perusahaan melaporkan bahwa tidak ada insiden terkait korupsi yang terjadi sama sekali dalam periode penilaian, namun datanya tidak dibandingkan dalam periode waktu berturut-turut
ATAU
Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) dalam periode waktu berturut-turut termasuk jumlah, sifat, dan tindakan yang diambil sebagai respons, namun data tersebut tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan.
ATAU

- Perusahaan melaporkan bahwa tidak ada insiden terkait korupsi yang terjadi sama sekali dalam periode penilaian dan data tersebut dibandingkan selama periode waktu berturut-turut namun tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan.
- 0.5 poin Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) hanya pada salah satu dari tiga dimensi: jumlah, sifat, atau tindakan yang diambil sebagai respons.
- ATAU
- Perusahaan melaporkan bahwa tidak ada insiden yang terjadi selama periode penilaian hanya pada beberapa topik terkait korupsi
- ATAU
- Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) hanya pada dua dari tiga dimensi: jumlah, sifat, atau Tindakan yang diambil sebagai respons, namun data tersebut tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan.
- ATAU
- Perusahaan melaporkan bahwa tidak ada insiden terkait korupsi yang terjadi sama sekali dalam periode penilaian, namun data tersebut tidak dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan dan tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan

B. Mengaudit dan/ atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung?

- 2 poin Perusahaan mengungkapkan data rinci mengenai peninjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai efektivitas tindakan yang diambil untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung.
- 1 poin Perusahaan mengungkapkan data terbatas mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai efektivitas tindakan yang diambil untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung
- 0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa peninjauan dan/atau audit rutin terhadap efektivitas tindakan yang diambil untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, diwajibkan dan harus dilakukan oleh badan internal atau eksternal yang teridentifikasi, namun tidak ada informasi mengenai peninjauan dan audit tersebut. /atau audit yang benar – benar dilakukan, di luar pernyataan

C. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/ atau tinjauan tersebut, untuk berupaya meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil guna mencegah segala bentuk suap dan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung?

- 2 poin Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai peninjauan dan/atau audit yang sebenarnya dilakukan dan mengungkapkan data tentang bagaimana perusahaan mengintegrasikan rekomendasi dan menindaklanjuti temuan untuk terus meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung.
- 1 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau peninjauan tersebut untuk terus meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, dan telah mengungkapkan informasi mengenai peninjauan dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, namun tidak ada informasi mengenai integrasi rekomendasi, selain pernyataan.
- 0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau peninjauan tersebut untuk terus meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, namun tidak ada informasi mengenai peninjauan dan/atau audit yang

benar-benar dilakukan, dan dengan demikian tidak ada informasi tentang integrasi rekomendasi

B.01.3 Perusahaan melacak, meninjau, dan bertindak untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing) untuk melaporkan kekhawatiran mengenai perilaku tidak etis. (/6.00)

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan bahwa secara sistematis:

A. Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan periode waktu berturut-turut, mengenai fungsi dan penggunaan mekanisme pelaporan pelanggaran, termasuk jumlah dan sifat insiden serta tindakan yang diambil sebagai responsnya?

2 poin Perusahaan mengungkapkan data terkini seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) dalam periode waktu berturut-turut mengenai jumlah, sifat, dan tindakan yang diambil sebagai respons.

ATAU

Perusahaan melaporkan bahwa tidak ada insiden yang dilaporkan sama sekali melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing) dalam periode penilaian dan data dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan.

1 poin Perusahaan mengungkapkan data terkini seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) hanya pada dua dari tiga dimensi: jumlah, sifat, atau tindakan yang diambil sebagai respons.

ATAU

Perusahaan melaporkan bahwa tidak ada insiden yang dilaporkan sama sekali melalui mekanisme pelaporan pelanggarannya, namun datanya tidak dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) dalam periode waktu yang berurutan dan sesuai dengan target jumlah, sifat, dan tindakan yang diambil sebagai respons, namun data tersebut tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan.

ATAU

Perusahaan melaporkan bahwa tidak ada insiden yang dilaporkan melalui mekanisme pelaporan pelanggaran selama periode penilaian dan data dibandingkan selama periode waktu berturut-turut namun tidak mencakup seluruh aktivitas Perusahaan

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terkini seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) dalam periode waktu berturut-turut mengenai jumlah, sifat dan tindakan yang diambil sebagai respons, namun data tersebut dikumpulkan di semua saluran pelaporan, dan tidak spesifik hanya untuk mekanisme pelaporan pelanggaran

0.5 poin Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) hanya pada salah satu dari tiga dimensi: jumlah, sifat, atau Tindakan yang diambil sebagai respons.

ATAU

Perusahaan melaporkan bahwa tidak ada insiden yang dilaporkan melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing) hanya pada topik tertentu saja

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) hanya pada dua dari tiga dimensi: jumlah, sifat, atau Tindakan yang diambil sebagai respons, namun data tersebut tidak mencakup seluruh aktivitas Perusahaan

ATAU

Perusahaan melaporkan bahwa tidak ada insiden yang dilaporkan melalui mekanisme pelaporan pelanggaran, namun data tersebut tidak dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan dan tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terbaru seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) hanya pada dua dari tiga dimensi: jumlah, sifat atau tindakan yang diambil sebagai respons, namun data tersebut dikumpulkan di seluruh saluran pelaporan, dan tidak spesifik hanya pada mekanisme pelaporan pelanggaran.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) dalam periode waktu berturut-turut mengenai jumlah, sifat dan Tindakan yang diambil sebagai respons, namun data tersebut tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan, dan data dikumpulkan di antara semua saluran pelaporan, dan tidak spesifik hanya untuk mekanisme pelaporan pelanggaran

ATAU

Perusahaan melaporkan bahwa tidak ada insiden yang dilaporkan melalui mekanisme pelaporan pelanggaran selama periode penilaian dan data dibandingkan selama periode waktu berturut-turut namun tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan, namun data dikumpulkan di antara semua saluran pelaporan, dan tidak spesifik hanya untuk mekanisme pelaporan pelanggaran

B. Mengaudit dan/ atau meninjau efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan data rinci mengenai review dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing).
- 1 poin** Perusahaan mengungkapkan data terbatas mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing).
- 0.5 poin** Perusahaan menyatakan bahwa dilakukan peninjauan dan/atau audit berkala terhadap efektivitas pelaporan pelanggaran. Mekanisme tersebut diperlukan dan harus dilakukan oleh badan internal atau eksternal yang teridentifikasi, namun tidak ada informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, selain pernyataan

C. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/ atau tinjauan tersebut, untuk berupaya meningkatkan efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang sebenarnya dilakukan dan mengungkapkan data tentang bagaimana perusahaan mengintegrasikan rekomendasi dan menindaklanjuti temuan untuk terus meningkatkan efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing).
- 1 poin** Perusahaan menyatakan telah mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau peninjauan tersebut untuk terus meningkatkan efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing), dan telah mengungkapkan informasi mengenai peninjauan dan/ atau audit yang sebenarnya telah dilakukan, namun belum terdapat informasi mengenai integrasi rekomendasi tersebut, di luar pernyataan.
ATAU
Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai peninjauan dan/atau audit yang sebenarnya dilakukan dan mengungkapkan beberapa informasi tentang bagaimana perusahaan mengintegrasikan rekomendasi dan menindaklanjuti temuan untuk terus meningkatkan efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing).
- 0.5 poin** Perusahaan menyatakan telah mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau peninjauan tersebut untuk terus meningkatkan efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran, namun tidak ada informasi mengenai peninjauan dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, sehingga tidak ada informasi mengenai integrasi rekomendasi.

B.02.1 Perusahaan mempunyai sistem untuk meminta pertanggungjawaban masing-masing dewan direksi dan manajer senior atas perilaku bisnis yang bertanggung jawab terkait isu-isu LST.

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan bahwa:

A. Peran dan tanggung jawab yang jelas ditetapkan untuk masing-masing dewan direksi dan manajer senior untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab terkait isu-isu LST?

- 2 poin** Perusahaan telah menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas di tingkat perusahaan yang mencakup individu di Tingkat dewan dan manajemen senior untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dalam isu-isu berikut: lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia.
- 1 poin** Perusahaan telah menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas di tingkat perusahaan yang mencakup individu di Tingkat dewan dan manajemen senior untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab hanya pada satu atau dua isu berikut: lingkungan, sosial, atau hak asasi manusia.
- 0.5 poin** Perusahaan telah menetapkan peran dan tanggung jawab di Tingkat perusahaan yang mencakup individu di tingkat dewan dan manajemen untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab, namun cakupannya masih belum jelas.

B. Apakah ada persyaratan kompetensi untuk manajemen senior utama dan posisi dewan yang bertanggung jawab atas isu-isu LST?

- 2 poin** Perusahaan mempunyai persyaratan kompetensi untuk manajemen senior utama dan posisi di tingkat dewan yang bertanggung jawab atas semua permasalahan berikut: lingkungan hidup, sosial dan hak asasi manusia.
- 1 poin** Perusahaan mempunyai persyaratan kompetensi untuk manajemen senior utama dan posisi di tingkat dewan yang hanya bertanggung jawab atas satu atau dua isu berikut: lingkungan hidup, sosial, atau hak asasi manusia.
- 0.5 poin** Perusahaan menyebutkan kualifikasi dan/atau pengalaman dan/atau program pelatihan berkelanjutan yang berkaitan dengan manajemen senior utama dan posisi dewan yang bertanggung jawab atas masalah lingkungan, sosial dan hak asasi manusia, namun tidak ada informasi mengenai persyaratan kompetensi yang sebenarnya

C. Masing-masing dewan direksi dan manajer senior yang bertanggung jawab atas kinerja tersebut diminta pertanggungjawaban melalui tindakan yang terdokumentasi?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai indikator-indikator yang terkait dengan kinerja isu-isu lingkungan, sosial dan hak asasi manusia yang termasuk dalam skema insentif remunerasi bagi individu yang bertanggung jawab baik di Tingkat dewan direksi maupun manajemen senior.
- 1 poin** Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai indikator-indikator yang terkait dengan kinerja isu-isu lingkungan, sosial dan hak asasi manusia yang termasuk dalam skema insentif remunerasi bagi individu yang bertanggung jawab baik di Tingkat dewan direksi atau manajemen senior.
ATAU
Perusahaan menyebutkan indikator-indikator yang berkaitan dengan kinerja dalam isu-isu lingkungan, sosial dan hak asasi manusia yang termasuk dalam skema insentif remunerasi bagi individu yang bertanggung jawab baik di tingkat dewan direksi atau manajemen senior, namun informasi mengenai metrik aktual dan implementasinya terbatas. melampaui deskripsi naratif.

0.5 poin Perusahaan mengacu pada perlunya mencegah segala bentuk suap dan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, namun tidak membuat komitmen yang jelas dalam dokumen formal yang disahkan oleh manajemen senior.

B.02.2 Perusahaan melacak, meninjau dan bertindak untuk meningkatkan keseimbangan gender di Tingkat dewan direksi dan manajemen senior

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan bahwa secara sistematis:

A. Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan periode waktu berturut-turut, mengenai persentase perempuan di Tingkat dewan direksi dan manajemen senior?

2 poin Perusahaan mengungkapkan data terkini seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai persentase perempuan di tingkat dewan direksi dan manajemen senior, dan data tersebut diungkapkan berdasarkan target dan dibandingkan dalam periode waktu berturut-turut.

1 poin Perusahaan mengungkapkan data terbaru seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai persentase perempuan di tingkat dewan direksi dan manajemen senior, dan data tersebut dibandingkan terhadap target, namun tidak diungkapkan dalam periode waktu berturut-turut.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terkini seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai persentase perempuan di tingkat dewan direksi dan manajemen senior, dan data tersebut dibandingkan dalam periode waktu berturut-turut, namun tidak diungkapkan berdasarkan target

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data seluruh perusahaan mengenai persentase perempuan di tingkat dewan direksi dan manajemen senior, dan data tersebut diungkapkan berdasarkan target dan dibandingkan dalam periode waktu berturut-turut, namun data tersebut sudah ketinggalan jaman (lebih tua dari periode penilaian).

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) mengenai persentase perempuan di tingkat dewan direksi dan manajemen senior, dan data tersebut diungkapkan berdasarkan target dan dibandingkan dalam periode waktu berturut-turut, namun tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan

0.5 poin Perusahaan mengungkapkan data terkini seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai persentase perempuan di tingkat dewan direksi dan/atau manajemen senior, namun data tersebut tidak diungkapkan berdasarkan target dan tidak dibandingkan dalam periode waktu berturut-turut.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) mengenai persentase perempuan di tingkat dewan direksi dan manajemen senior, dan data tersebut dibandingkan terhadap target, namun tidak diungkapkan dalam periode waktu berturut-turut dan tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terkini seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai persentase perempuan di tingkat dewan direksi dan manajemen senior, dan data tersebut dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan, namun tidak diungkapkan berdasarkan target dan tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data mengenai persentase perempuan di tingkat dewan direksi dan manajemen senior, dan data tersebut diungkapkan berdasarkan target dan dibandingkan dalam periode waktu berturut-turut, namun data tersebut sudah ketinggalan jaman (lebih tua dari periode penilaian) dan tidak mencakup seluruh kinerja perusahaan.

B. Mengaudit dan/ atau meninjau efektivitas intervensinya (program, inisiatif, dll) untuk meningkatkan keseimbangan gender di tingkat manajemen senior?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan data rinci mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai efektivitas intervensinya guna meningkatkan keseimbangan gender di tingkat manajemen senior.
- 1 poin** Perusahaan mengungkapkan data terbatas mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai efektivitas intervensinya guna meningkatkan keseimbangan gender di tingkat manajemen seni.
- 0.5 poin** Perusahaan menyatakan bahwa peninjauan dan/atau audit rutin terhadap efektivitas intervensinya (program, inisiatif, dll) untuk meningkatkan keseimbangan gender di tingkat manajemen senior diperlukan dan harus dilakukan oleh badan internal atau eksternal yang teridentifikasi, namun tidak ada informasi atas revidu dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, di luar pernyataan

C. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/ atau tinjauan tersebut, untuk berupaya meningkatkan keseimbangan gender di Tingkat manajemen senior?

- 2 poin** Perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang sebenarnya dilakukan dan mengungkapkan data tentang bagaimana perusahaan mengintegrasikan rekomendasi dan menindaklanjuti temuan untuk terus meningkatkan efektivitas intervensinya guna meningkatkan keseimbangan gender di tingkat manajemen senior.
- 1 poin** Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau tinjauan tersebut untuk terus meningkatkan efektivitas intervensinya (program, inisiatif, dll) guna meningkatkan keseimbangan gender di tingkat manajemen senior, dan telah mengungkapkan informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang sebenarnya telah dilakukan, namun tidak ada informasi mengenai integrasi rekomendasi, selain pernyataan
- 0.5 poin** Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau tinjauan tersebut untuk terus meningkatkan efektivitas intervensinya (program, inisiatif, dll) guna meningkatkan keseimbangan gender di tingkat manajemen senior, namun tidak ada informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, sehingga tidak ada informasi mengenai integrasi rekomendasi.

B.03.1 Perusahaan mengungkapkan secara terbuka semua hak milik sah yang memberikan hak untuk mengekstraksi sumber daya mineral di lokasi tambangnya

Dapatkah perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa:

A. Mengungkapkan kepada publik semua kepemilikan hukum (misalnya kontrak, izin, lisensi, sewa, konvensi, perjanjian) yang memberikan hak untuk mengekstraksi sumber daya mineral di lokasi tambangnya?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan kepemilikan hukum yang memberikan hak untuk mengekstraksi sumber daya mineral untuk seluruh Lokasi tambangnya.
- 1 poin** Perusahaan mengungkapkan hak legal yang memberikan hak untuk mengekstraksi sumber daya mineral untuk setidaknya setengah dari lokasi tambangnya, namun tidak seluruh lokasi tambang.
- 0.5 poin** Perusahaan mengungkapkan hak legal yang memberikan hak untuk mengekstraksi sumber daya mineral untuk setidaknya satu lokasi tambang, namun kurang dari setengah lokasi tambangnya.

B. Membuat dokumen-dokumen ini tersedia secara gratis di situs web perusahaannya?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan hak milik sah untuk semua lokasi tambangnya di situs web perusahaannya.
- 1 poin** Perusahaan mengungkapkan hak milik resmi untuk semua lokasi tambangnya, namun hanya tersedia di berbagai situs anak perusahaan.
ATAU
Perusahaan mengungkapkan hak milik sah untuk beberapa lokasi tambangnya di situs web perusahaannya
- 0.5 poin** Perusahaan mengungkapkan hak milik sah untuk beberapa lokasi tambangnya di berbagai situs anak Perusahaan

C. Mengungkapkan dokumen-dokumen ini kepada publik sebagai dokumen teks lengkap tanpa penyuntingan atau penghilangan?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan secara lengkap hak milik hukum yang memberikan hak untuk mengekstraksi sumber daya mineral untuk seluruh lokasi tambangnya.
- 1 poin** Perusahaan mengungkapkan secara lengkap hak milik resmi yang memberikan hak untuk mengekstraksi sumber daya mineral untuk setidaknya setengah dari lokasi tambangnya, namun tidak untuk semua lokasi tambang.
- 0.5 poin** Perusahaan mengungkapkan secara lengkap hak milik sah yang memberikan hak untuk mengekstraksi sumber daya mineral untuk setidaknya satu lokasi tambang tetapi kurang dari setengah lokasi tambang

B.04.1 Perusahaan menerapkan transparansi perpajakan di seluruh yurisdiksi perpajakannya (/6.00)

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa perusahaan tersebut secara publik:

A. Mengungkapkan struktur perusahaannya dengan menyebutkan semua yurisdiksi perpajakan di mana entitas tersebut terdaftar dan atas nama apa (misalnya entitas anak perusahaan atau cabang) entitas tersebut dikenal di tempat tersebut?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan struktur perusahaannya, dengan menyebutkan semua yurisdiksi perpajakan di mana entitas tersebut terdaftar dan atas nama apa entitas tersebut dikenal di tempat tersebut.
- 1 poin** Perusahaan mengungkapkan struktur perusahaannya, dengan hanya menyebutkan beberapa yurisdiksi perpajakan di mana entitas tersebut terdaftar dan dengan nama apa entitas tersebut dikenal di tempat tersebut.
ATAU
Perusahaan mengungkapkan struktur perusahaannya, dengan menyebutkan semua nama entitas terdaftarnya tetapi tidak menyebutkan yurisdiksi pajak tempat mereka terdaftar.
- 0.5 poin** Tidak ada

B. Laporan mengenai pendekatannya terhadap transparansi perpajakan, termasuk strateginya terkait dengan kehadirannya di yurisdiksi dengan pajak rendah?

- 2 poin** Perusahaan ini melaporkan pendekatannya terhadap transparansi perpajakan, termasuk strateginya terkait kehadirannya di yurisdiksi dengan pajak rendah.

- 1 poin Perusahaan melaporkan pendekatannya terhadap transparansi pajak, namun tidak mengungkapkan strateginya terkait dengan kehadirannya di yurisdiksi dengan pajak rendah.
- 0.5 poin Perusahaan menyebutkan transparansi perpajakan, namun tidak melaporkan pendekatannya terhadap transparansi perpajakan

C. Mengungkapkan semua manfaat pajak dan pembebasan pajak yang diterima di tingkat lokal dan nasional di semua yurisdiksi perpajakan di mana entitas tersebut terdaftar?

- 2 poin Perusahaan mengungkapkan data mengenai semua manfaat pajak, pembebasan pajak, keringanan pajak, dan kredit pajak yang diterimanya baik di tingkat lokal maupun nasional.
- 1 poin Perusahaan mengungkapkan data mengenai semua manfaat pajak, pembebasan pajak, keringanan pajak, dan kredit pajak yang diterimanya, namun dalam bentuk agregat, tanpa informasi di tingkat lokal dan nasional
- 0.5 poin Perusahaan mengungkapkan informasi terbatas mengenai beberapa manfaat pajak atau kredit pajak yang diterimanya.

B.05.1 Perusahaan mengungkapkan kepada publik pemilik manfaat utamanya (/6.00)

Dapatkah perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa perusahaan tersebut secara public:

A. Mengungkapkan nama-nama individu yang merupakan pemilik manfaat utama (yaitu bukan hanya pemegang saham langsung), dengan menyebutkan tingkat kepemilikan ambang batas yang diterapkan pada pengungkapan ini?

- 2 poin Perusahaan mengungkapkan semua nama pemilik manfaat akhir – atau negara pengendali dalam hal BUMN.
- 1 poin Perusahaan hanya mengungkapkan nama beberapa pemilik manfaat akhir – atau negara pengendali dalam kasus BUMN – yang memiliki setidaknya 50% saham perusahaan
- 0.5 poin Perusahaan hanya mengungkapkan nama salah satu pemilik manfaat akhir Perusahaan – atau Negara pengendali dalam hal BUMN.

B. Mengungkapkan bagaimana kepemilikan dimiliki dan bagaimana pengendalian dilaksanakan?

- 2 poin Perusahaan mengungkapkan informasi tentang bagaimana seluruh pemilik manfaat individu – atau Negara yang mengendalikan, misalnya BUMN – memegang kepemilikan dan bagaimana mereka menjalankan kendali atas perusahaan tersebut.
- 1 poin Perusahaan mengungkapkan informasi tentang bagaimana seluruh pemilik manfaat individu – atau Negara yang mengendalikan dalam hal BUMN - memegang kepemilikan, namun tidak memberikan informasi tentang bagaimana mereka melakukan kontrol terhadapnya.
- 0.5 poin Perusahaan mengungkapkan informasi yang terbatas mengenai bagaimana beberapa pemilik manfaat individualnya – atau Negara yang mengendalikan, dalam kasus BUMN – memiliki kepemilikan, namun tidak memberikan informasi tentang bagaimana mereka menjalankan kendali atas perusahaan tersebut.

C. Mengidentifikasi penerima manfaat yang merupakan orang-orang yang terpapar politik dan mengungkapkan informasi terkini secara berkala?

- 2 poin Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai penerima manfaat yang merupakan orang-orang yang memiliki hubungan politik dan mengungkapkan informasi terkini secara berkala.
- 1 poin Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai penerima manfaat yang merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan politik, namun tidak mengungkapkan informasi terkini secara rutin
- 0.5 poin Perusahaan tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik negara dan mengungkapkan informasi terbatas mengenai badan-badan negara yang memegang kendali atas perusahaan tersebut.

B.06.1 Perusahaan mengungkapkan secara terbuka semua pembayaran yang dilakukannya kepada pemerintah daerah dan nasional, serta menyediakan data terpilah berdasarkan tingkat proyek. (/6.00)

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa:

A. Mengungkapkan kepada publik informasi terpilah di tingkat proyek mengenai semua pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah daerah dan nasional?

- 2 poin Perusahaan mengungkapkan pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah daerah dan nasional (yaitu: di semua negara produsen), berdasarkan proyek terpilah.
ATAU
Proyek ini mengungkapkan seluruh pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah pusat, berdasarkan proyek terpilah, dan semua pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah daerah, namun tidak berdasarkan proyek terpilah
- 1 poin Perusahaan mengungkapkan semua pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah nasional, berdasarkan proyek terpilah, namun tidak secara sistematis mengungkapkan pemilahan berdasarkan proyek Tingkat sub-nasional
ATAU
Perusahaan mengungkapkan pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah nasional dan daerah, berdasarkan proyek terpilah, namun tidak untuk semua negara produsennya
ATAU
Perusahaan mengungkapkan seluruh pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah pusat dan daerah, namun tidak berdasarkan proyek terpilah.
- 0.5 poin Perusahaan mengungkapkan sebagian pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah daerah dan/atau nasional.
ATAU
Perusahaan mengungkapkan semua pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah pusat namun tidak berdasarkan proyek terpilah, dan tidak secara sistematis menunjukkan pemilahan pada tingkat sub-nasional
ATAU
Perusahaan mengungkapkan angka agregat untuk seluruh pembayarannya kepada pemerintah.

B. Menjadikan informasi ini tersedia secara bebas di situs web perusahaannya?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan di situs web perusahaannya semua pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah daerah dan nasional, berdasarkan proyek terpilah.
- 1 poin** Perusahaan mengungkapkan seluruh pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah daerah dan nasional berdasarkan proyek terpilah, namun pembayaran ini hanya tersedia di situs web anak perusahaan.
ATAU
Perusahaan mengungkapkan di situs web perusahaannya beberapa pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah daerah dan nasional, berdasarkan proyek terpilah
ATAU
Perusahaan ini mengungkapkan di situs web perusahaannya semua pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah pusat, berdasarkan proyek terpilah, namun tidak mengungkapkan di situs web perusahaannya semua pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah daerah.
- 0.5 poin** Perusahaan mengungkapkan sebagian pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah daerah dan/atau nasional di situs web anak perusahaannya.

C. Memperbarui informasi ini setiap tahun?

- 2 poin** Sesuai (a), dengan pembaruan tersedia setiap tahun.
- 1 poin** Sesuai (a), dengan pembaruan tersedia setiap tahun.
- 0.5 poin** Sesuai (a), dengan pembaruan tersedia setiap tahun.

B.07.1 Jika memungkinkan, perusahaan mengungkapkan secara terbuka praktik dan posisi lobinya yurisdiksi (/6.00)

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa perusahaan tersebut secara publik:

A. Mengungkapkan peran dan tanggung jawab mereka yang terlibat dalam kegiatan lobi di semua yurisdiksi?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan nama dan tanggung jawab semua pelobinya.
- 1 poin** Perusahaan mengungkapkan nama dan tanggung jawab pelobinya setidaknya untuk satu negara.
Perusahaan mengacu pada pelobi aktif tetapi tidak mengungkapkan nama apa pun
- 0.5 poin** ATAU
Perusahaan mengungkapkan nama-nama pelobinya tanpa tanggung jawab mereka (atau hanya informasi terbatas) dan buktinya tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan.

B. Mengungkapkan pokok permasalahan kegiatan lobi dan hasil yang ingin dicapai?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan semua pokok bahasan dari semua aktivitas lobinya dan semua hasil yang ingin dicapai.

1 poin Perusahaan mengungkapkan beberapa pokok bahasan kegiatan lobinya dan hasil yang ingin dicapai, namun bukti tersebut tidak mencakup seluruh kegiatan perusahaan.

0.5 poin Perusahaan mengungkapkan beberapa pokok permasalahan kegiatan lobinya tanpa informasi yang jelas mengenai hasil yang dicari dan buktinya tidak mencakup seluruh kegiatan perusahaan.

C. Mengungkapkan nama pejabat atau lembaga publik yang dilibatkan?

2 poin Perusahaan mengungkapkan nama seluruh institusi atau pejabat publik yang dilibatkan

1 poin Perusahaan mengungkapkan nama beberapa institusi atau pejabat publik yang dilibatkan.

0.5 poin Perusahaan mengungkapkan sifat lembaga atau pejabat yang terlibat dalam konteks kegiatan lobi, namun tidak mengungkapkan nama apa pun.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan nama salah satu lembaga atau pejabat publik yang dilibatkan

B.08.1 Perusahaan mempunyai sistem untuk mengidentifikasi dan menilai risiko hak asasi manusia, tenaga kerja dan lingkungan yang terkait dengan pemasok dan kontraktornya

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa mereka mempunyai sistem untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan pemasok dan kontraktornya pada:

A. Masalah hak asasi manusia?

2 poin Perusahaan ini mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk melakukan uji tuntas terhadap pemasok dan kontraktornya guna mengidentifikasi risiko terkait isu hak asasi manusia, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

1 poin Perusahaan ini mempunyai sistem untuk melakukan uji tuntas terhadap pemasok dan kontraktornya guna mengidentifikasi risiko terkait isu hak asasi manusia, namun bukti mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini masih terbatas.

0.5 poin Perusahaan memberikan bukti hanya satu atau dua kasus pelaksanaan uji tuntas terhadap pemasok dan kontraktornya untuk mengidentifikasi risiko terhadap masalah hak asasi manusia, dan tidak ada bukti adanya pendekatan atau sistem di seluruh perusahaan.

ATAU

Perusahaan menyebutkan bahwa mereka melakukan uji tuntas terhadap pemasok dan kontraktornya untuk mengidentifikasi risiko terkait masalah hak asasi manusia, namun tidak memberikan informasi tambahan apa pun

B. Masalah ketenagakerjaan?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk melakukan uji tuntas terhadap pemasok dan kontraktornya guna mengidentifikasi risiko terkait masalah ketenagakerjaan, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini

1 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk melakukan uji tuntas terhadap pemasok dan kontraktornya guna mengidentifikasi risiko terkait masalah ketenagakerjaan, namun bukti mengenai cakupan dan isi sistem ini masih terbatas.

0.5 poin Perusahaan hanya memberikan bukti satu atau dua kasus pelaksanaan uji tuntas terhadap pemasok dan kontraktornya untuk mengidentifikasi risiko masalah ketenagakerjaan, dan tidak ada bukti adanya pendekatan atau sistem di seluruh perusahaan.

ATAU

Perusahaan menyebutkan bahwa mereka melakukan uji tuntas terhadap pemasok dan kontraktornya untuk mengidentifikasi risiko terkait masalah ketenagakerjaan, namun tidak memberikan informasi tambahan apa pun.

C. Isu yang berkaitan dengan lingkungan?

2 poin Perusahaan ini mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk melakukan uji tuntas terhadap pemasok dan kontraktornya guna mengidentifikasi risiko terhadap masalah lingkungan, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk melakukan uji tuntas terhadap pemasok dan kontraktornya guna mengidentifikasi risiko terkait masalah lingkungan hidup, namun bukti mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini masih terbatas.

0.5 poin Perusahaan memberikan bukti hanya satu atau dua kasus pelaksanaan uji tuntas terhadap pemasok dan kontraktornya untuk mengidentifikasi risiko terhadap masalah lingkungan, dan tidak ada bukti adanya pendekatan atau sistem di seluruh perusahaan.

ATAU

Perusahaan menyebutkan bahwa mereka melakukan uji tuntas terhadap pemasok dan kontraktornya untuk mengidentifikasi risiko terkait masalah lingkungan, namun tidak memberikan informasi tambahan apa pun.